

STUART HALL AND BRIMINGHAM SCHOOL OF CULTURAL STUDIES



Mengenal *Cultural Studies* Melalui Pemikiran Stuart Hall.

M. Muiz Mahdi Fiqhiya

"Cultural studies is not a sovereign discipline-nation, nor is it a colony that "belongs" to some parent discipline's "empire." Instead, it's a set of loosely affiliated—but widely scattered—nomadic groups that (at least in its academic manifestations) roam across the disciplinary terrain with a deliberate disregard for disciplinary borders."

– Gilber B. Rodman¹

Stuart Hall adalah salah satu pendiri *Birmingham School of Cultural Studies* di Inggris. Mazhab Birmingham (*Birmingham School of Cultural Studies*) merujuk pada sebuah pusat penelitian pascasarjana di Universitas Birmingham Inggris. Pusat penelitian memiliki nama *Center for Contemporary Cultural Studies* (CCCS) meskipun lumrah dikenal dengan mazhab Birmingham. CCCS didirikan pada tahun 1964 di bawah masa jabatan Direktur Richard Hoggart yang dilanjutkan kemudian oleh Stuart Hall. Sosok-sosok lain selain Richard Hoggart dan Stuart Hall adalah Raymond Williams dan E.P. Thompson. Stuart sebagai direktur dari CCCS memiliki tiga orang staf, dua mahasiswa sebagai asisten penelitian tingkat doctoral dan 40 lebih mahasiswa penelitian pascasarjana. Di masanya, CCCS tidak lagi berada di

¹ Kutipan ini berasal dari buku Rodman yang berjudul *Why Cultural Studies?*. Kutipan ini sengaja dipilih karena mampu menggambarkan *cultural studies* sebagai sebuah studi dan gerakan pemikiran.

departemen Bahasa Inggris dan mulai membangun reputasinya sendiri. Jurnal publikasi riset pertama CCCS bernama *Working Paper in Cultural Studies (WPSC)* dalam jurnal ini pula Stuart Hall menuliskan pandangannya tentang persoalan disiplin keilmuan juga pondasi dari *cultural studies* itu sendiri.

Stuart Hall lahir di Jamaika, tepatnya di kota Kingston di tahun 1932. Dia dan ibunya meninggalkan Jamaika dan berpindah ke Inggris, disana dia menjadi mahasiswa Universitas Oxford dan mendapatkan gelar master di Merton College. Selama karir akademiknya, Hall sangat dipengaruhi oleh pemikir-pemikir kiri di Inggris yang mana paham kiri baru (*new left*) sedang populer kala itu. Kiri baru sebagai gerakan intelektual dan politik pada dasarnya menggeser paradigma marxisme atau paham sosialisme dari yang mulanya berpusat pada gerakan ekonomi-politik kemudian berubah menjadi gerakan kebudayaan. Pada tahun 1964, Hall menulis *The Popular Arts*² bersama Paddy Whannel yang aktif mengkaji film. Karya itu kemudian membawa Hall bergabung dengan CCCS dan menulis banyak buku dan teori budaya termasuk karya populernya yaitu *Encoding and Decoding in the Television Discourse* pada tahun 1973.

Memetakan *Cultural Studies*

Lantas apa sebenarnya *cultural studies*? Stuart Hall dalam *Cultural Studies and the Centre* yang dimuat dalam *Working Paper in Cultural Studies* menjelaskan konteks dari lahirnya gerakan pemikiran ini. Pemahaman dasar yang Hall tulis adalah bahwa *cultural studies* bersifat interdisipliner bahkan anti-disiplin. Artinya *cultural studies* akan melibatkan berbagai macam disiplin keilmuan (interdisipliner) dan tidak ingin didefinisikan sebagai disiplin keilmuan (anti-disiplin). Pengertian anti-disiplin disini menjadi sangat penting karena *cultural studies* juga tidak bisa disebut sebagai “sub” keilmuan tertentu yang interdisiplin misalnya psikolinguistik yang menggabungkan disiplin ilmu psikologi dan linguistik. Hall sendiri menyatakan bahwa tidak ada klaim kepemilikan atas *cultural studies*, maka pada dasarnya menyatakan bahwa *cultural studies* adalah milik disiplin ilmu bahasa atau sosiologi adalah keliru. Begitupun dengan pernyataan bahwa *cultural studies* adalah

² Buku ini berupa panduan kritis yang ditujukan untuk para pendidik sebagai respon terhadap berkembangnya media massa dan budaya populer.

milik kajian marxisme atau kiri baru meskipun konteks kelahirannya tentu berkaitan. Hall menyatakan bahwa ketika *cultural studies* telah lahir, maka pada saat itu pula *cultural studies* akan menggunakan beragam pendekatan yang lebih luas bahkan lebih luas dibandingkan ruang lingkup Mazhab Brimingham kala itu. Di masa awalnya ketika CCCS mulai menulis beragam karya, *cultural studies* sangat erat dengan riset yang berkaitan dengan teks-teks visual (alih-alih sastra) atau antropologi (ketimbang sosiologi). Sehingga memang pada dasarnya CCCS menggunakan beragam pendekatan dari ilmu-ilmu yang telah mapan seperti bahasa, sastra, sosiologi, atau antropologi. Para peneliti *cultural studies* akan sering menggunakan metode penelitian yang berbasis teks (kajian tekstual) atau lapangan (etnografi). Tentunya ada konteks dibalik penolakan pendefinisian *cultural studies* sebagai disiplin keilmuan atau penggunaan metode-pendekatan yang diambil dari disiplin ilmu lain untuk bahkan digunakan dengan cara yang berbeda pula.

Masih merujuk pada tulisan Hall dalam WPCS, dia memberikan alasan yang juga merupakan konteks dari *cultural studies*. Dia menyatakan bahwa pencarian asal-usul itu memang menggoda termasuk pencarian konteks historis lahirnya *cultural studies*. Permulaan yang pasti jarang sekali ditemukan bahkan dalam disiplin keilmuan lainnya. Alih-alih mendapati kontinuitas dan keterputusan, *cultural studies* justru merupakan intervensi baru yang merefleksikan berbagai peristiwa yang gagal ditemukan atau terungkap dalam disiplin keilmuan yang mapan. Hadirnya *cultural studies* justru memberi dampak dalam perkembangan disiplin keilmuan yang mapan tersebut. Maka *cultural studies* lahir dari keterputusan tersebut, hasil dari bentuk intervensi yang menciptakan konfigurasi baru.

Rodman dalam bukunya *Why Cultural Studies?* Memberikan analogi yang sangat membantu untuk memahami ini. Dia menggambarkan disiplin-disiplin ilmu yang mapan sebagai negara berdaulat yang memiliki masyarakat, sistem politik, aturan main, dan batas teritorinya masing-masing. Sedangkan *cultural studies* bukan negara berdaulat, dia adalah masyarakat nomaden yang senang berpindah-pindah ke berbagai negara berdaulat tersebut. Sayangnya masyarakat nomaden tidak pernah mau membangun negara yang statis dengan batas-batas teritori. Mereka lebih senang berpindah-pindah dan terus beradaptasi dengan teritori-teritori baru. Bagitulah *cultural studies*, dia senang meminjam berbagai metode, teori, dan pendekatan dari disiplin-disiplin ilmu lain. Kehadirannya justru mengisi ruang-

ruang yang selama ini tidak diperhatikan oleh disiplin-disiplin ilmu lain. Misalnya perebutan makna, negosiasi identitas, dan sebagainya.

Budaya Populer

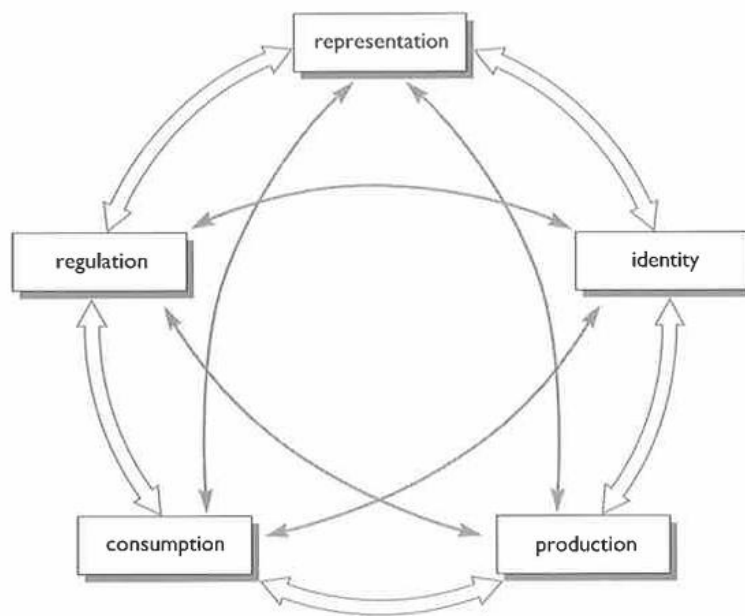
Budaya atau dalam Bahasa Inggrisnya “*culture*” disebut sebagai bagian dari tiga kata rumit dalam Bahasa Inggris menurut Raymond Williams. Maka untuk melihat apa yang dimaksud dengan budaya populer, kita akan selalu dihadapkan dengan pertanyaan apa yang “hadir/absen” ketika kita menggunakan istilah tersebut sebagai konsekuensi dari kerumitan istilah budaya di dalamnya. Tentunya budaya populer sendiri memiliki pembandingnya jika kita ingin mendefinisikannya (baik implisit atau eksplisit). Beberapa kategori konseptual misalnya seperti: budaya rakyat (*folk culture*), budaya massa, budaya adiluhung, budaya dominan, atau budaya kelas pekerja. Bahkan sebelum membahas semua istilah yang melekat dengan budaya, kita tentunya harus memahami terlebih dahulu budaya itu sendiri.

Raymond Williams setidaknya memberikan tiga definisi tentang budaya. Pertama, budaya bisa dipahami sebagai proses intelektual, spiritual, dan perkembangan estetika. Sebut saja perkembangan kebudayaan di Eropa Barat yang juga merujuk pada para filsuf besar, seniman, dan sastrawan yang bahkan dikagumi hingga saat ini. Kedua, budaya bisa dipahami sebagai cara hidup atau kehidupan sehari-hari kita. Entah apapun masyarakatnya, periodenya, atau kelompoknya. Tidak ada faktor intelektual, spiritual, dan estetika dalam hal ini. Kegiatan-kegiatan seperti membaca, berlibur, berolahraga, kuliner, atau festival adalah contoh-contohnya. Ketiga, William melihat juga budaya sebagai kerja-kerja intelektual khususnya dalam kegiatan artistik. Dalam definisi ketiga ini budaya dilihat sebagai proses produksi makna yang merujuk pada apa yang disebut oleh orang-orang strukturalis dan pos-strukturalis sebagai *signifying practices*. Maka ketika berbicara tentang budaya populer tampaknya definisi kedua dan ketiga lebih dekat dengan terma populer itu sendiri. Budaya dipahami sebagai kehidupan sehari-hari kita. Tentunya kehidupan sehari-hari kita tidak luput juga dari berbagai persoalan budaya. Persoalan seperti kekerasan simbolik, marginalisasi, relasi kuasa, dan semacamnya dalam kacamata Williams disebut sebagai *the politics of the everyday life* atau politik dalam keseharian. Persoalan inilah yang kemudian luput dibahas dalam disiplin ilmu mapan seperti sosiologi yang terlalu bergumul dengan

angka dan antropologi yang terlalu terfokus pada kelompok adat. Pembahasan-pembahasan seperti selera music, aktivitas menonton, membaca komik, bermain game, atau sekadar *scrolling* media sosial (meskipun di zamannya hanya ada TV) merupakan praktik-praktik budaya dalam kategori budaya populer.

Sirkuit Budaya

Sirkuit budaya adalah peta analisis dalam *cultural studies* yang juga ditulis oleh Stuart Hall dalam *Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman*. Sirkuit budaya ini adalah hasil dari analisis terhadap satu produk budaya yang ternyata memiliki model teoritis dengan dasar artikulasi yang berbeda. Artikulasi disini adalah proses menghubungkan elemen yang berbeda-beda untuk membentuk satu kesatuan yang bersifat sementara. Konsep artikulasi ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya. Ada lima proses budaya yang berhasil diidentifikasi dalam buku tersebut yaitu: representasi, identitas, produksi, konsumsi, dan regulasi. Lima proses ini digunakan untuk meneliti *Sony Walkman* sebagai produk budaya dari caranya direpresentasikan, identitas yang diasosiasikan, bagaimana barang tersebut diproduksi dan dikonsumsi, juga mekanisme regulasi yang berkaitan dengan distribusi dan penggunaannya.



Gambar 1 Sirkuit Budaya

Tidak penting dari mana seseorang harus memulai, siapapun bisa berangkat dari bagian manapun. Karena pada dasarnya satu elemen akan berkaitan dengan elemen yang lainnya. Misalnya jika kita mulai dari representasi maka selanjutnya kita bisa membahas konstruksi identitasnya, begitupun dengan elemen-elemen lainnya. Buku *Doing Cultural Studies: the story of the Sony Walkman* merupakan contoh penerapan analisis dari kelima elemen proses budaya tadi. Artinya satu artefak atau fenomena budaya bisa dibahas melalui lima proses budaya sekaligus.

Artikulasi Identitas

Artikulasi identitas kultural biasanya digunakan untuk meneliti sebuah komunitas untuk melihat bagaimana identitas digunakan untuk menghadapi suatu tantangan yang dialami komunitas. Hall menyebut bahwa artikulasi adalah cara memahami formasi-formasi sosial tanpa terjebak pada reduksionisme dan esensialisme. Reduksionisme berarti pemahaman yang mereduksi kompleksitas formasi sosial sehingga menciptakan stigma-stigma atau pendefinisian yang keliru tentang identitas komunitas. Sedangkan esensialisme adalah anggapan bahwa identitas itu statis dan harus kembali pada wujud keotentikan atau kesejatiannya. Esensialis memandang sesuatu sudah ditetapkan secara alamiah dan kodrati. Artikulasi juga merupakan cara menyikapi struktur sebagai fragmen-fragmen dari apa yang dianggap sebagai suatu kesatuan total. Artinya totalitas dikritik dan dipertanyakan melalui artikulasi. Artikulasi juga merupakan cara untuk mengungkapkan struktur dan permainan kekuasaan yang membentuk struktur tersebut, mana yang dominan dan subordinat. Artikulasi juga memberikan mekanisme untuk melakukan intervensi formasi sosial atau konteks sosial tertentu secara intelektual.

Sederhananya artikulasi adalah cara bagaimana unsur-unsur yang berbeda bisa digabungkan dan dipasang-pasangkan. Sehingga apa yang sebelumnya tidak terhubung kemudian diberi ekspresi sehingga keduanya terhubung. Sehingga artikulasi adalah suatu kesatuan yang dibentuk oleh unsur-unsur yang berbeda. Ketika unsur-unsur ini diartikulasikan, mereka terpisah dan tidak berada pada satu arena yang sama. Artikulasi memang menyatukan dua elemen atau lebih yang berbeda dalam satu kondisi tertentu namun tidak bersifat mutlak dan mesti sama sepanjang waktu. Cara ini menyelidiki bagaimana ideologi menemukan subjeknya dan membantu kita untuk memahami bagaimana ideologi digunakan untuk memberdayakan masyarakat (bukan

untuk mengibuli/*false consciousness*). Sehingga masyarakat mampu memahami situasi historisnya sendiri tanpa menyempitkannya menjadi situasi ekonomi, kelas, atau sosial semata.

Artikulasi bersifat *contigent*, artinya hanya ada jika diperlukan dan tidak perlu dipertahankan selama-lamanya. Mobilisasi unsur-unsur yang bahkan saling berkontradiksi malah menjadi sebuah relasi koheren pada suatu momen tertentu dalam sebuah komunitas yang mungkin tidak berlaku bagi komunitas lain. Tujuannya untuk menciptakan makna baru dari ceceran berbagai unsur untuk mengukuhkan identitas mereka. Alasannya adalah komunitas mengalami krisis eksistensi dan legitimasi yang mana hak-hak mereka terancam sehingga mengartikulasikan identitas adalah cara bertahan hidup. Seperti misalnya satu kelompok masyarakat yang terancam pengusuran oleh industri pertambangan, mereka perlu untuk mengekspresikan identitas mereka sehingga dianggap penting untuk dipertahankan.

Maka dalam artikulasi, tradisi dijadikan sebagai strategi. Tradisi tidak lagi disakralkan, malah digunakan untuk bertahan. Tradisi akan terus digunakan selama strategi tersebut bekerja untuk menjawab tantangan yang ada, maka dia akan terus digunakan dan lama-lama mentradisi di dalam komunitas tersebut. Masalahnya adalah tantangan selalu berubah, maka strategi juga harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Maka perubahan adalah keniscayaan bagi suatu tradisi.

Artikulasi sering digunakan untuk melihat bagaimana sebuah komunitas mengekspresikan dirinya untuk merespon perubahan dan krisis sehingga mereka bisa resilien. Artikulasi juga mengungkapkan bagaimana komunitas secara kreatif memberdayakan dirinya sendiri untuk menghadapi krisis. Dengan artikulasi juga kita bisa memahami bagaimana identitas kultural dibentuk atas dasar alasan strategis dan bersifat arbitrer yang tidak menuntut koherensi. Selain itu, dengan artikulasi juga kita bisa memahami mengapa sebuah tradisi bisa berubah karena adanya krisis. Hal ini tentunya menentang anggapan bahwa tradisi harus dilestarikan sebagai sebuah pandangan yang mereduksi kompleksitas masalah komunitas.

Representasi: *Encoding-Decoding*

Hall menjelaskan kasus *encoding* dan *decoding* dalam risetnya tentang siaran televisi. Dalam *Encoding and Decoding in the Television Discourse* dia menolak proses komunikasi massa yang hanya terfokus pada model linier yaitu pengirim-pesan-penerima. Hall melihat bahwa proses komunikasi dalam media justru lebih kompleks dari sekadar makna yang

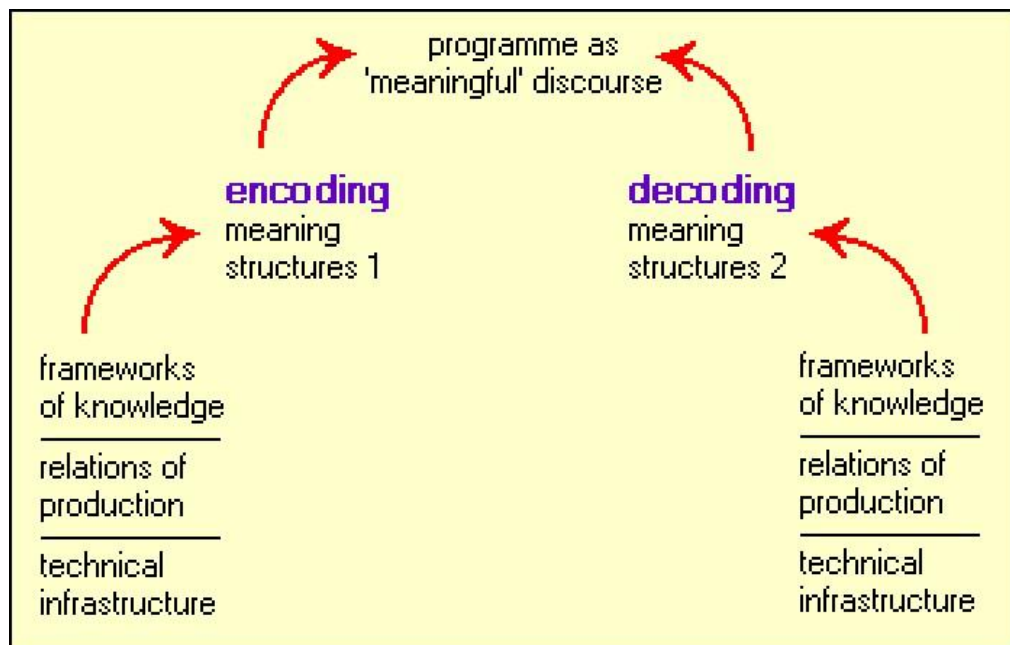
dikirimkan secara linier dari pengirim ke penerima. Hall melihat proses komunikasi sebagai sirkulasi makna. Sirkulasi makna yang dimaksud disini adalah proses produksi-distribusi-produksi yang berasal dari konsepsi produksi komoditas ala Marx. Dalam proses ini sirkulasi makna menjadi proses peralihan bentuk. Makna selalu dibawa oleh wahana tanda (modalitas) seperti bentuk televisi yang berisi modalitas suara dan visual. Modalitas berarti medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti teks, suara, visual, atau gabungan ketiganya. Dalam proses produksi makna serangkaian tanda dibentuk untuk menciptakan wahana simbolik yang bisa disirkulasikan sebagai produk. Proses ini membutuhkan berbagai instrumen material juga relasi sosial seperti organisasi media. Ketika didistribusikan, produksi diskursif (bentuk wacana) disirkulasikan kepada audiens yang berbeda-beda. Setelah itu, audiens perlu membongkar/menerjemahkan diskursus tersebut ke dalam praktik sosial sehingga menjadikannya efektif. Makna harus didapatkan oleh audiens untuk bisa menjadi proses konsumsi. Ketika makna tidak tersirkulasikan dalam praktik audiens maka komunikasi tidak efektif.

Dalam proses *encoding-decoding*, peristiwa harus tunduk pada pengkodean untuk bisa disampaikan pada audiens. Artinya sebuah peristiwa sejarah akan tunduk pada modalitas yang digunakan untuk menyampaikan, proses yang kemudian kita sebut sebagai *encoding*. Peristiwa harus menjadi cerita untuk bisa disampaikan pada audiens, bagaimana cerita tersebut disampaikan dengan modalitas tertentu adalah proses dari *encoding* itu sendiri. Relasi sosial juga berpengaruh dalam proses ini, aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi media adalah konsekuensi sosiopolitik, mempengaruhi bagaimana makna dikemas. Bentuk pesan adalah bentuk penampakan yang diperlukan oleh suatu peristiwa untuk bisa berada dalam sirkulasi dari pengirim ke penerima. Bentuk pesan ini telah ditentukan batas-batasnya oleh sifat modalitasnya atau relasi sosial pengirimnya.

Jika membahas kasus televisi, struktur institusi penyiaran dan berbagai praktik juga jaringan produksi di dalamnya dituntut untuk menghasilkan sebuah program. Proses kerja buruh penyiaran di dalamnya adalah proses produksi yang mengonstruksi pesan. Proses di dalamnya tentu sangat kompleks dalam diskursusnya, mempertimbangkan pengetahuan dalam produksi, keterampilan teknis yang dibentuk secara historis, ideologi profesi, pengetahuan kelembagaan, asumsi tentang audiens, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini

menjadi struktur produksi dalam televisi yang melahirkan diskursus televisi tersebut. Struktur ini sangat terbuka, mereka mengambil topik, teknik penanganan peristiwa, personalia (SDM), bayangan tentang audiens, dan deskripsi tentang fakta atau situasi dari sumber dan dari formasi diskursif lainnya. Audiens menjadi sumber sekaligus penerima pesan. Sehingga sirkulasi dan penerimaan merupakan proses produksi dalam televisi. Maka momen penerimaan atau proses konsumsi merupakan bagian dari produksi dalam pengertian yang lebih luas. Produksi dan penerimaan tidak identik namun berhubungan, keduanya adalah bagian dari proses komunikasi secara keseluruhan.

Dalam prosesnya, penyiaran harus mengkodekan pesan-pesan dalam bentuk diskursus. *Encoding* adalah proses dimana pesan mengikuti aturan bahasa formal. Pesan harus melalui tahap pengkodean atau enkoding sehingga menjadi diskursus yang bermakna untuk kemudian didekodekan secara bermakna pula. Ketika didekodekan pesan ini akan memiliki efek entah itu memengaruhi, menghibur, merayu, dan sebagainya. Ketika pesan didekodekan maka akan ada konsekuensi tingkah laku, ideologis, emosional, kognitif, dan persepsi indrawi yang kompleks. Maka *decoding* adalah proses dimana pesan berubah bentuk menjadi praktik sosial. Untuk menggambarkan proses ini berikut sirkulasi makna ini digambarkan:



Gambar 2 Sirkulasi encoding dan decoding

Struktur makna 1 dan struktur makna 2 dalam bagan mungkin tidak sama. Enkoding dan dekoding tidak simetris secara sempurna. Artinya pesan yang disampaikan pengirim belum tentu sama dengan yang diterima oleh penerima. Tingkat kesimetrisan pesan yang diterima bergantung pada pemahaman dan kesalahpahaman. Keidentikan/ketidakidentikan kode yang sempurna atau tidak sempurna memungkinkan pesan ditransmisikan, diintrupsi, atau didistorsikan. Ketidakcocokan kode menciptakan perbedaan posisi antara penyiar dan audiens. Distorsi adalah bentuk kesalahpahaman yang muncul dari kurangnya ekuivalensi (kesamaan pemahaman kode) antara kedua pihak dalam komunikasi. Kajian ini pun membuka peluang pada kajian baru yang berkaitan dengan audiens. Cara pandang kajian media berubah, yang pada mulanya memposisikan penyiar sebagai posisi paling berkuasa untuk mempengaruhi audiens berubah menjadi audiens yang juga memiliki kuasa untuk memaknai pesan dalam proses *decoding*. Maka dengan mempelajari hal ini kita tahu bahwa representasi kekerasan di layar TV bukanlah kekerasan melainkan pesan tentang kekerasan.

Dalam linguistik ada istilah makna denotasi dan konotasi, seringkali makna denotasi dianggap sebagai makna “real”-nya. Padahal makna denotasi adalah makna arbitrer sebagai hasil dari konvensi bahasa manusia. Seringkala dalam televisi atau medium gambar makna denotasi ini menjadi universal dan natural. Padahal artikulasi asosiatif dari makna denotatif harus tetap dilihat sebagai makna yang arbitrer dan konvensional bahkan dalam medium tulis atau lisan sekalipun. Gambar sapi yang kita lihat di TV bukanlah sapi yang sebenarnya. Dia harus tetap dipandang sebagai gambar sapi, meskipun sapi itu mengeluarkan suara. Artinya ketika peristiwa atau realitas itu telah dikodekan dalam medium audio-visual maka dia berubah menjadi representasi yang punya batas-batasnya sendiri, misalnya kita tidak bisa mencium bau sapi tersebut atau melihatnya sebagai objek tiga dimensi. Jika makna denotasi berkaitan bersifat asosiasi, maka makna konotasi bersifat konotatif alias lebih cari dan berubah-ubah. Maka pada level konotatif fragmen ideologi bekerja. Dalam bahasa visual, universalisasi dan naturalisasi seringkali dianggap objektif. Padahal sifatnya tetap sama sebagai representasi belaka. Di level konotatif, bahasa visual sangat berkaitan dengan latar belakang ideologi dan budaya. Artinya unvirsalisasi dan naturalisasi seringkai tidak berlaku dalam level ini. Makna bersifat polisemi, artinya satu medium punya beragam makna. Namun konteks budaya pun punya tingkat ketertutupannya sendiri yang beragam untuk

mengategorikan. Tingkat ketertutupan ini menunjukkan mana budaya dominan yang tentunya tidak bersifat *univocal* dan tak terbantahkan. Peristiwa yang mengganggu atau dianggap problematis akan berlawanan langsung dengan pikiran *common sense* sebagai “makna terpilih” dalam budaya dominan.

Praktik pertelevisian seringkali menuntut keobjektifan. Cita-cita mereka adalah komunikasi yang transparan dan sempurna. Maka biasanya mereka menggunakan kode-kode dominan karena kekhawatiran audiens gagal untuk menerima makna yang ingin mereka sampaikan. Tentunya hal ini sangatlah sulit karena proses komunikasi akan terdistorsi secara sistematis. Audiens memiliki pemaknaan mereka sendiri berdasarkan persepsi selektif mereka. Proses persepsi selektif tidak pernah sangat acak, seringkali menunjukkan pola tertentu. Sehingga pendekatan baru apapun terkait studi audiens harus dimulai dari proses persepsi selektif. Hall disini mengidentifikasi tiga posisi dekoding yang mungkin. Tiga posisi ini memperkuat bahwa tidak adanya korespondensi atau kesalahpahaman yang niscaya ketika audiens menafsirkan pesan. Makna yang dihasilkan dari proses selektif lagi-lagi tidak begitu liar juga tidak identik dengan encoding-nya. Tiga posisi ini juga harus tetap diuji dan diperhalus secara empirik (melihat langsung audiens) sehingga kita bisa melihat komunikasi yang terdistorsi secara sistematis.

Posisi hipotesis pertama adalah *hegemonik-dominan*. Penonton/audiens dalam posisi ini mengambil makna yang terkonotasikan dari “misalnya” siaran berita televisi sepenuhnya dan langsung. Mengambil pesan langsung dari kode rujukan encoding-nya. Kita bisa menyebut penonton dalam kasus ini melakukan pengoprasian dalam lingkup kode dominan. Inilah kemudian tipe komunikasi yang dianggap ideal dan transparan secara sempurna atau lebih tepatnya mendekati. Tentunya posisi audiens yang seperti ini adalah posisi yang diinginkan oleh organisasi media. Para profesional di bidang penyiaran dibayar untuk mengodekan pesan hegemonik dalam pengoprasian program mereka. Penandaan suatu peristiwa oleh para profesional penyiaran menggunakan kode-kode dominan-hegemonik yang sebenarnya sangat kompleks untuk dipahami secara mendetail dalam proses pengerjaannya. Sehingga disini posisi kelembagaan penyiaran berubah menjadi ‘aparatus ideologis’, para profesional penyiaran juga dikaitkan dengan struktur akses ketika mereka

punya kemampuan untuk mereproduksi definisi yang hegemonik bahkan secara tidak sadar. Tentunya di dalamnya banyak kontradiksi dan kesalahpahaman.

Posisi kedua adalah posisi yang *dinegosiasikan*. Dalam posisi ini audiens tidak langsung menerima kode yang totaliter dan hegemonik. Dekoding dalam versi ini bersifat adaptif dan oposisional. Audiens mengakui definisi hegemonik dalam level signifikansi yang lebih umum (abstrak), sedangkan pada level yang lebih terbatas dan situasional mereka membuat aturan dasarnya sendiri. Audiens memberikan posisi pada definisi dominan sembari membuat penerapan yang ternegosiasikan dalam konteks lokal. Logika partikular dan situasional bekerja pada audiens yang ditopang dengan narasi perlawanan. Hal inilah yang kemudian dipahami oleh elit media dan para profesional sebagai kegagalan komunikasi.

Posisi ketiga adalah bertentangan secara keseluruhan atau *detotalize*. Audiens melucuti ketotalitasan kode yang terpilih untuk kembali menjadikan pesan tersebut sebagai totalitas dalam beberapa kerangka rujukan alternatif. Artinya pesan digunakan untuk menentang balik kode dominan hegemonik. Kode yang seperti ini disebut dengan kode oposisional. Maka dalam posisi ini politik penandaan bertarung dalam perang diskursus dan politik representasi.

***Cultural Studies* Sebagai Kajian Anti-Disiplin**

Stuart Hall memberikan pondasi dasar bagaimana *cultural studies* dipahami. *Cultural studies* tidak bisa disebut sebagai sebuah disiplin keilmuan yang mapan, tidak pula disebut sub-disiplin karena sifat interdisiplinernya. Anti-disiplin adalah karakteristik yang tepat untuk menggambarkan. Karena *cultural studies* tidak mendefinisikan diri sebagai sebuah disiplin keilmuan. Fungsinya adalah untuk mengisi celah kerputusan disiplin ilmu lain sehingga kontinuitas kajian disiplin ilmu lain bisa berkembang. Jika melihat dari konsep-konsep yang diberikan oleh Stuart Hall, pengisian celah keterputusan ini sangat terlihat. Misalnya dalam konsep artikulasi, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh antropologi atau sosiologi yang berkaitan dengan krisis eksistensial dan ekspresi identitas. Atau dalam konsep *encoding-decoding* yang telah mengisi celah disiplin ilmu komunikasi yang terlalu linier dalam sirkulasi makna; pengirim-pesan-penulis. Atau juga mengisi celah linguistik tentang makna denotatif-konotatif yang malah terjebak dalam makna yang bias.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Clarke, J. (2018). Stuart Hall and the theory and practice of articulation. In *Hallmarks: The cultural politics and public pedagogies of Stuart Hall* (pp. 129-140). Routledge.

Hall, S. (2003). Cultural Studies and the Centre: some problematics and problems*. In *Culture, media, language* (pp. 2-35). Routledge.

Hall, S. (2007). Encoding and decoding in the television discourse. In *CCCS selected working papers* (pp. 402-414). Routledge.

Du Gay, P., Hall, S., Janes, L., Madsen, A. K., Mackay, H., & Negus, K. (2013). *Doing cultural studies: The story of the Sony Walkman*. Sage.

Kortesoja, M. (2023). *Power of Articulation: Imagery of Social Structure and Social Change*. Palgrave Macmillan.

Rodman, G. B. (2014). *Why cultural studies?*. John Wiley & Sons.

Storey, J. (2021). *Cultural theory and popular culture: An introduction*. Routledge.

Slack, J. D. (2006). The theory and method of articulation in cultural studies. In *Stuart Hall* (pp. 124-140). Routledge.

Web

<https://www.ebsco.com/research-starters/biography/stuart-hall>